

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi-studi tentang tarekat sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Sekurang-kurangnya terdapat empat tipologi yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami kajian tentang tarekat, yaitu: Pertama, tarekat dalam keterkaitannya dengan dunia sosial-politik yang profan. Penelitian dalam konteks ini menghadirkan berbagai pandangan mengenai hubungan tarekat dengan politik, seperti yang ditulis Al Abza et al., (2019) dalam topik Hubungan Kekuatan Antara Tarekat Qadiriyyah WaNaqsabandiyah (Tarekat Cukir) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jombang, dalam studi ini Abza menjelaskan bahwa pola relasi saling menguntungkan (*Simbiosis Mutualism*) terjadi antara Tarekat Cukir dengan Negara/Bupati Jombang karena di dalam relasi tersebut keduanya merasa saling membutuhkan dan saling diuntungkan, sementara dalam relasi dengan PPP justru pola relasi yang terbentuk tidak saling menguntungkan (*Simbiosis Parasitism*).

Kajian lain yang relevan seperti yang ditulis oleh Shadiqin (2017) yang berjudul *Di Bawah Payung Habib: Sejarah, Ritual, dan Politik Tarekat Syattariyyah Di Pantai Barat Aceh*, Abdurahman (2008) dengan judul *Gerakan Sosial-Politik Kaum Tarekat Di Priangan Abad XX*, Setiyawati (2012) dengan judul *Tarekat Naqsabandiyah Dalam Ranah Politik Lokal*, Usman (1998) dengan topik *Komunitas Tarekat Dan Politik Lokal di Era Orde Baru*, Arsyad & Syam (2014) dengan topik *Preferensi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah Di Majene Dalam Pemilukada Kabupaten Majene Tahun 2011*, Syukur (2014) dalam topik *Transformasi Gerakan Tarekat Syafawiyah Dari Teologis Ke Politis*, dan sebagainya. Keseluruhan studi itu menjelaskan bahwa

tarekat memiliki peran signifikan mempengaruhi perkembangan sosial-politik dalam lingkungannya masing-masing.

Kedua, kajian tarekat yang terfokus pada ajaran dan penyebarannya seperti kajian (Van Bruinessen, 1995) dalam Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, juga tulisan Martin Van Bruinessen yang mendiskusikan tentang Guru Tarekat dan Tarekat Di Masyarakat Madura, Siregar (2011) dengan topik Tarekat Naqsyabandiyah Syekh Abdul Wahab Rokan: Sejarah, Ajaran, Amalan, dan Dinamika Perubahan, (N. Syam, 2004) yang membahas tentang Pembangkitan Kaum Tarekat, Zulaikhah (2005) dengan topik Tarekat Syattariah di Jawa Akhir Abad XIX, dan lain-lain.

Ketiga, kajian tarekat yang terfokus pada sosial dan budaya seperti kajian (N. Syam, 2005) yang membahas tentang Islam Pesisir, Anshori (2011) dengan topik Tasawuf dan Revolusi Sosial dan (Syam, 2013) dengan judul Tarekat Petani: Fenomena Tarekat Syattariyah Lokal dan tulisan (Simuh, 1996) yang mengangkat tentang Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. Selanjutnya tulisan (Zulkifli, 2002) mengkaji tentang "*Sufism in Java: the Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java*". Penelitian ini memiliki kesamaan metode dengan Martin dan Muhaimin, namun dengan analisis yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pesantren dan para kyai di Jawa telah berperan dalam menanamkan tasawuf kepada para santrinya sehingga tumbuh pesat melalui institusi pesantren. Zulkifli melihat bahwa ibadah haji merupakan media dalam menghubungkan ulama Indonesia yang mengajar di Mekah (Masjid Al-Haram), seperti Imam Nawawi Al-Bantani dan Syeikh Ahmad Khatib Sambas dengan para santri di Indonesia untuk menyalurkan ilmu tasawufnya sehingga terjadi relasi antara tradisi Jawa dan Mekah.

Keempat, kajian tentang tarekat dalam hubungannya dengan sosial-ekonomi seperti kajian Pababari (2008) dengan topik Katup

Pengaman Sosial: Kajian Sosiologis Tarekat Qadiriyyah di Polmas Sulawesi Barat, Hakim (2019) menulis tentang Peran Tarekat Dalam Perubahan Perilaku Ekonomi (Studi Kasus Tarekat Naqshabandiyah Di Ponpes Ngashor Jember), Mu'tasim & Mulkhan (1998) meneliti tentang "Bisnis Kaum Sufi: Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri". Penelitian ini mengkaji tentang kehidupan sosio-ekonomi penganut Tarekat Syadzaliyyah di Kudus Kulon, Jawa Tengah. Penelitian ini menjelaskan bahwa relasi antara kehidupan spiritual dan sosial penganut Tarekat Syadzaliyyah tercermin dari tiga pusat kegiatan kehidupan mereka: rumah, pasar, dan masjid. Etos kerja yang bersumber dari ajaran tarekat berkembang menjadi dasar ekonomi produktif. Jaringan bisnis kaum Tarekat Syadzaliyyah menjadi suatu sistem yang memberi landasan kekuasaan dan pengembangan ekonomi produktif. Di sini juga tercermin adanya dualisme, di mana di satu sisi mereka sangat fanatik terhadap ajaran tarekatnya, tetapi di satu sisi mereka bekerja keras pada waktu siang dalam usaha mencari untung dari kegiatan ekonomi yang dijalankan. Penelitian ini menepis tuduhan bahwa kaum tarekat sangat skeptis terhadap kehidupan material, tetapi mereka juga turut andil dalam usaha bisnis dan kegiatan ekonomi yang mereka jalankan.

Sebagai bagian dari kajian tarekat dalam konteks sosial dan politik, kajian tentang "**Paragmatisme Politik Organisasi Islam Lokal: Studi Kasus Tarekat Naqshabandiyah Dalam Politik Lokal Rokan Hulu**" ini menggambarkan interaksi tarekat dengan dunia sosial-politik khususnya dalam konteks kontestasi politik lokal Indonesia pasca Orde Baru. Interaksi antara tarekat dan politik sungguh tidak dapat dielakkan mengingat dalam sejarah perkembangannya tarekat senantiasa memengaruhi dinamika politik di tempat ia berada. Demikian juga dengan perkembangan kehidupan politik di Indonesia dewasa ini, kaum tarekat nyatanya juga melakukan serangkaian adaptasi dengan lingkungan sosial-politiknya itu.

Tradisi dan akhlak tarekat juga mengekspresikan kesalehan ritual-vertikal yang bergamit dengan kesalehan sosial-horizantal. Karena itu, tradisi dan akhlak tarekat selain bersifat kekal juga memiliki daya sebagai kekuatan pendorong dalam setiap perubahan, pembaharuan dan kemajuan manusia (Zuhud, 2013). Ajaran tarekat mengajarkan pencarian makna agama sebagai simbol suci dengan menekankan pada aspek mendalam (*esoteris*) dibanding dimensi luar (*eksoteris*) melalui ritual wirid (*dzikir*) yang terstruktur di bawah bimbingan *mursyid* (guru tarekat). Ajaran tarekat tersebut terkonseptualisasi dalam tiga hal mendasar, yaitu *takhalli* (menjauhkan diri dari segala tindakan yang tercela), *tahalli* (melakukan semua perbuatan yang terpuji) dan *tajalli* (menghias diri dengan akhlak terpuji). Tarekat juga dapat dipahami sebagai ajaran yang hidup dalam historisitas kemanusiaan. Artinya, sebagai pengikut tarekat pastilah tidak akan terlepas dengan konteks kebudayaan di mana dia hidup. Dalam hal ini, bisa jadi penganut tarekat akan berkuat di antara dua arus utama pedoman kehidupan (*pattern for behavior*) ajaran tarekat di satu sisi dan kebudayaan di sisi yang lainnya.

Perkembangan hubungan tarekat dan budaya itu membentuk kesatuan unik, Simuh (1996) dalam kajiannya tentang transformasi tasawuf Islam ke mistik jawa sebagai *Sufisme – Jawa* yang mempertahankan budaya jawa dalam penyebaran Islam. Sementara jika ditarik ke dalam ranah penelitian ini, hubungan antara tarekat dan budaya telah membentuk identitas masyarakat rantau Rokan yang menggamitkan antara budaya dan Islam serta perkembangannya yang luar biasa sehingga daerah penelitian ini (Rokan Hulu) mendapat julukan sebagai *Negeri Seribu Suluk*. Begitu pula dalam hubungannya dengan dinamika politik, tarekat tidak berada dalam suasana antagonis melainkan simbiosis mutualisme.

Pertautan antara Tarekat dan politik memang tidak dapat dihindari, dalam sejarah perkembangan tarekat di Indonesia, tarekat

menampilkan tipologi gerakan sosial-politik yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi sosial-politik pada zamannya (Abdurahman, 2008). Gerakan Tarekat di abad 19 sebagaimana yang ditulis oleh (Abdurahman, 2008) tampil sebagai gerakan perlawanan melawan kolonialisme Barat dalam bentuk konfrontasi fisik, sementara pada awal abad 20 gerakan Tarekat bergeser kebentuk proses penguatan basis sosial keagamaan di pedesaan. Kemudian pasca kemerdekaan, gerakan sosial-politik tarekat ditunjukkan dalam proses partisipasi politik dan kerjasama dengan pemerintah atau kekuatan-kekuatan sosial politik bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sementara itu, kajian ini tergolong dalam kajian mengenai gerakan Tarekat di abad 21 yang dicirikan dengan kuatnya pengaruh teknologi informasi dalam lingkungan sosial-politik yang semakin berkembang dan berubah termasuk perubahan rezim pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru.

Gerakan sosial-politik tarekat itu telah menampilkan sisi yang unik dengan keragaman pola pengembangan ajaran dan peranannya dalam dinamika sosial-politik termasuk gerakan sosial-politik Tarekat Naqshabandiyah di Rokan Hulu-Riau. Saling kait antara tarekat dan politik (kekuasaan) menjadi ciri khusus gerakan sosial politik tarekat. Tarekat tidak pernah benar-benar berada di luar kekuasaan, ciri ini disebutkan dalam banyak referensi seperti yang ditulis oleh Putra (2012) bahwa tarekat-tarekat sufi pada masa lalu berperan sebagai kekuatan politik dibanyak negeri Islam. Transformasi gerakan kaum tarekat menjadi kekuatan politik bahkan telah terjadi sejak awal ajaran tarekat mulai disebarkan oleh tokoh-tokohnya (Bruinessen, 1992). Pada abad ke-18 di Palembang misalnya, perlawanan terhadap agresi penjajah dilakukan oleh pengikut Tarekat Sammaniyah pimpinan Syekh Abdus Samad Al Palimbani. Begitu pula dengan perjuangan Syekh Yusuf Al Makassar yang satu abad sebelumnya, yang dikenal sebagai penyebar ajaran Tarekat Khalwatiah. Sementara itu di Riau dan

Sumatera Utara, Syekh Abdul Wahab Rokan dan Sultan Langkat dikenal memiliki kedekatan dalam upaya melawan kolonialisme Belanda. Dengan kata lain, pada zaman pra kemerdekaan Indonesia, gerakan politik tarekat telah muncul dalam bentuk gerakan melawan penjajah (kolonialisme). Sementara itu pada masa kemerdekaan, gerakan politik Tarekat muncul dalam dimensi yang lain, seperti sumber suara dalam pemilihan umum. Bruinessen bahkan menyebut bahwa di Indonesia partai-partai politik khususnya Golongan Karya (Golkar) sangat sadar dengan potensi tarekat sebagai “gudang suara” (Martin Van Bruinessen, 1995). Pernyataan Bruinessen itu didasari atas fakta bahwa penganut tarekat (dengan beragam variasi alirannya) begitu banyak dan menyebar serta berpengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Islam terutama di wilayah pedesaan. Demikian halnya dengan penyebaran ajaran Tarekat Naqshabandiyah di Rokan Hulu, sebagai pusat penyebaran ajaran Tarekat di Riau, Rokan Hulu memang dikenal sebagai basis jamaah Tarekat Naqshabandiyah.

Tarekat Naqshabandiyah di Rokan Hulu didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan dan dalam sejarah penyebaran ajaran Tarekat pertautan Tarekat dengan sosial - budaya masyarakat di Rantau Rokan berjalan beriringan. Dalam perkembangannya, pengaruh Syekh Abdul Wahab Rokan cukup besar, hal ini ditandai dengan meluasnya ajaran Tarekat di rantau rokan serta berdirinya surau-surau suluk di daerah lain seperti Kampar, Bangko, Minas, Kandis, Duri dan Bengkalis. Dalam konteks kehidupan sosial-religius masyarakat Rokan Hulu, Tarekat Naqshabandiyah merupakan salah satu kelompok keagamaan yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Rokan. Ada tiga indikasi yang memperkuat pandangan ini, *pertama*, praktik ajaran yang mencirikan Tarekat ini meluas hampir ke seluruh wilayah Rokan Hulu dan sekitarnya, mulai dari praktek latihan spiritual (*riyādlah*) dan amalan-amalan kontemplatif (*dzikir jahr* dan *sirr*) di surau suluk. *Kedua*, sikap dan tindakan (*ta'zim*) kepada para guru (*Mursyid*) Tarekat

Naqshabandiyah dan *Ketiga*, penghormatan terhadap makam-makam para guru (*Mursyid*) Tarekat Naqshabandiyah. Hal itu pula yang menyebabkan tarekat menjadi kekuatan sosial-politik yang cukup berpengaruh, baik dalam hubungannya dengan kegiatan sosial keagamaan maupun dalam aktivitas-aktivitas politik. Karena alasan-alasan itu pulalah yang menjadikan tarekat sebagai kelompok keagamaan dengan basis sosial yang besar dan mengakar serta potensial. Tiga indikasi itu yang kemudian mendorong orang tarekat dan orang di luar tarekat untuk mempertautkan Tarekat dengan politik dan kondisi ini semakin menguat pasca Orde Baru.

Pergeseran sistem politik Indonesia pasca Orde Baru membawa arus perubahan yang cukup mendasar utamanya bagi kepentingan daerah. Masyarakat di daerah memiliki peran yang signifikan untuk menentukan pemimpinnya sendiri melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan selama masa pemerintahan Orde Baru yang sejak semula negara Orde Baru sengaja dirancang Suharto untuk dijadikan sebagai negara kuat dengan sentralisasi kekuasaan di tangannya. Suharto juga menggunakan pendekatan "*stick and carrot*" (Gaffar, 1998 dalam Moeliono, 2003). Negara orde baru memberikan "*rewards*" yang sebaik-baiknya dalam penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan dan jabatan kepada individu, lembaga maupun kelompok yang secara jelas menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya "*stick*" dipakai untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan lawan-lawan politik yang menjadi saingannya dalam mengakumulasi kekuasaan. Hal ini dilakukan secara sistematis melalui perangkat ideologi, kelembagaan, maupun pribadi (Sanit, 2015), karenanya, gerakan-gerakan kelompok Islam semakin mengecil.

Pasca Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat antusias untuk terlibat atau sekadar mengikuti perdebatan dan perbincangan mengenai politik Indonesia yang sangat dinamis dan terbuka. Kehadiran partai

politik baru pasca Orde Baru melengkapi keinginan dan saluran politik masyarakat yang sebelumnya terbelenggu oleh mekanisme Pemilu ala Orde Baru. Menguatnya peran masyarakat pasca Orde Baru dan berubahnya mekanisme penyaluran partisipasi politik turut mempengaruhi cara dan metode partai politik dan para elit berkepentingan menghimpun dukungan publik termasuk dukungan dari kelompok keagamaan Islam. Zuly Qodir (dalam Jubba, 2017) menyebut umat Islam menjadi sasaran utama mengingat secara sosiologis dan politis sangat kuat. Upaya merebut simpati umat Islam sebagai kelompok pemilih mayoritas tentu didasarkan pada kondisi, arus dan kepentingan umat Islam itu sendiri. Berbagai cara pun dilakukan dalam rangka menjadi pemenang, mulai dari cara konvensional seperti kampanye, penyebaran visi misi, publikasi calon di media massa, hingga cara-cara yang irasional dengan melibatkan 'dukun' atau para-normal politik, bahkan melibatkan agama. Padahal, politik itu sendiri adalah aktivitas yang sangat rasional (Jubba, 2017).

Kemunculan muslim kelas menengah perkotaan, berkembangnya teknologi informasi dan terbukanya ruang publik baru di desa melalui media sosial, secara langsung dan tidak langsung membuat Islam menjadi komoditas dan juga menciptakan konsumerisme Islam dan Muslim yang konsumtif. Perubahan sosial di tingkat lokal ini juga pada akhirnya berpengaruh terhadap proses Islamisasi politik yang sedang berjalan di Indonesia, di antaranya adalah dalam proses politik elektoral di mana calon anggota legislatif atau eksekutif (kepala daerah) dalam upayanya untuk terpilih harus mampu menampilkan citra Muslim yang ideal. Pendekatan yang demikian juga tidak lepas dari pengaruh organisasi Islam dan mayoritas masyarakat muslim yang ada di daerah itu. Sehingga penggunaan simbol-simbol Islam menjadi titik awal bagaimana kuatnya upaya elite partai menggunakan instrumen agama (Islam) sebagai alat politik untuk

menggugah perhatian umat Islam yang pada gilirannya mendorong partisipasi dan mobilisasi suara dalam pemilu/pilkada.

Menguatnya hubungan Islam dan politik paling tidak ditandai dengan semakin kokohnya posisi kelompok-kelompok keagamaan memengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Tidak hanya pada tataran politik nasional, menguatnya peran kelompok keagamaan dalam tataran politik lokal juga semakin terasa seperti pengaruh kelompok Tarekat Naqshabandiyah dalam tatanan politik lokal di Rokan Hulu Riau. Memang komunitas ini tidak melembaga secara formal namun mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Rokan Hulu. Tarekat Naqshabandiyah telah menjadi identitas Islam orang Rokan, berbagai hal dalam kehidupan masyarakat akan selalu terkait dengan tarekat apalagi dalam persoalan politik. Oleh karena itu, politisasi tarekat dalam dinamika politik lokal menjadi tidak terhindarkan selain karena kedudukannya yang strategis dalam alur budaya masyarakat Rokan juga karena pengikutnya yang loyal. Sikap loyalitas itu terbentuk karena hubungan guru-murid yang pada gilirannya akan menentukan tingkat kemajuan spiritualitas pengikut tarekat. Kemajuan spiritual seorang pengikut tarekat ditandai dengan adanya *ijâzah* dari seorang guru. Tingkatan kemajuan seorang pengikut tarekat dimulai sebagai *mansûb* (pengikut biasa) kemudian menjadi *muqaddam* (murid), khalifah (pembantu syekh) dan akhirnya menjadi seorang mursyid (guru)

Posisi Tarekat Naqshabandiyah yang vital dan strategis dalam lingkungan sosial politik orang Rokan berdampak pada tindakan intra dan ekstra komunitas. Para elit politik dan elit tarekat menyadari bahwa hubungan tarekat dengan politik akan menentukan masa depan pengaruh politiknya di Rokan Hulu. Hal itu ditandai dengan eratnya hubungan antara komunitas tarekat dengan elit-elit politik yang memiliki nasab dengan tarekat dan juga sebaliknya. Pada akhirnya, sikap itu dipandang sebagai gejala pragmatisme elit keagamaan dan elit

politik lokal Rokan Hulu. Gejala ini menurut Berger (1991) merupakan bentuk legitimasi religius yang memberikan semacam stabilitas dan kontinuitas kepada formasi-formasi tatanan sosial. Oleh karenanya, mempertahankan status-quo atas posisi lembaga agama dan lembaga politik dalam masyarakat yang berubah adalah keniscayaan, terlebih dalam situasi sosial-politik yang bebas (liberal).

Lebih lanjut Berger melukiskan hubungan dialektik agama dan dinamika sosial berlangsung dalam tiga tahap; eksternalisasi ketika agama sebagai ekspresi duniawi; objektivasi ketika agama menjadi fakta atau referensi tindakan; dan internalisasi ketika agama diberi makna oleh penganutnya (Berger, 1991). Lebih lanjut Berger menjelaskan bahwa pada dasarnya agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk suatu kosmos keramat (sakral). Akan tetapi usaha demikian di dalam eksistensi manusia pada akhirnya merupakan aktivitas yang bereksternalisasi dengan mencurahkan makna ke dalam realitas. Dengan demikian, agama bagi manusia adalah bangunan makna-makna yang tereksternalisasi dan terobjektivasi serta selalu mengarah pada totalitas yang bermakna. Karena itu, agama memainkan peranan strategis dalam usaha manusia membangun dunia. Dengan kata lain, agama berarti jangkauan terjauh dari eksternalisasi diri manusia melalui peresapan makna-maknanya sendiri ke dalam realitas.

Berger juga melihat fungsi agama sebagai legitimasi terhadap realitas sosial karena agama menghubungkan konstruksi-konstruksi realitas dari masyarakat empiris dengan realitas keramat. Proses legitimasi religius ini berlangsung secara dialektis antara aktivitas religius dan ideasi religius dalam urusan praktis kehidupan sehari-hari. Jika terdapat ideasi religius yang kompleks, hal itu harus dipahami sebagai (tidak lebih daripada) suatu cerminan kepentingan-kepentingan praktis sehari-hari yang berasal dari ideasi itu. Demikian halnya legitimasi religius muncul dari aktivitas manusia dalam suatu tradisi

keagamaan dan memperlihatkan adanya hubungan yang berarti antara agama dan solidaritas sosial.

Berdasarkan penjabaran di atas, studi ini berusaha memahami dan menjelaskan rasionalitas terjadinya pragmatisme Tarekat Naqsabandiyah dalam ruang politik tersebut, baik menyangkut motivasi dan latar belakang terjadinya pragmatisme (tindakan politik), relasi antara elit tarekat dan elit politik, kebertahanan (survivalitas) tarekat serta implikasinya dalam konteks kekinian serta mempelajari arah dukungan politik Tarekat Naqsabandiyah dengan variasi sejarah dan realita sosial-politik lokal di Rokan Hulu dalam era sistem politik demokrasi pasca Orde Baru.

1.2 Rumusan Masalah

Relasi tarekat dan politik di Rokan Hulu merupakan gambaran bahwa dua entitas ini tidak dapat dipisahkan. Relasi yang turut membangun kehidupan sosial dan budaya orang Rokan berlandaskan pada hubungan *taqlid* serta moralitas berdasarkan Islam termasuk dalam urusan politik kekuasaan. Berpijak pada kenyataan itu dapat dikatakan bahwa sejatinya, sikap politik *mursyid* dan murid tarekat cenderung akomodatif terhadap penguasa (Ziadi, 2018). Sikap politik *mursyid* tarekat ini didasarkan pada *fiqh Sunni* abad pertengahan yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (*maslahat*), sikap politik ini ditempuh agar dapat menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat tarekat (Ziadi, 2018). Penganut tarekat baik ketika masih bercorak paternalistik maupun yang sekarang ternyata bukan orang-orang yang jauh dari hal-hal yang bersifat duniawi seperti kekuasaan atau politik, penganut tarekat senantiasa tampil dalam percaturan politik dan bahkan terlibat pula dalam pemerintahan (Mufid, 2006).

Seiring dengan hal itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi berikut ini. *Pertama*, perkembangan Islam Sufisme (Tarekat Naqshabandiyah) mempengaruhi dinamika kehidupan sosio-politik dan religius masyarakat di Rokan Hulu. Tarekat Naqshabandiyah di Rokan Hulu merupakan aliran tarekat yang berkembang dengan bentuk neo-sufisme yang mensinergikan antara tasawuf dan syari'at sehingga ajarannya bersifat dinamis. Sifat dinamis tersebut dimanifestasikan dengan memperlunak filosofi mistisnya sehingga dapat beradaptasi dengan syari'at Islam dan tradisi budaya Rokan Hulu. Hal ini terbukti dengan adanya pengaruh sufistik terhadap berbagai tradisi sosial-keagamaan lokal seperti perayaan maulid, haul, isra' miraj, mandi petang balimau dan sebagainya. *Kedua*, dinamika sosio-politik dan kultural serta perubahan sistem politik demokratis di Indonesia disadari oleh kaum tarekat di Rokan Hulu sebagai salah satu arena eksistensi sehingga kaum tarekat mesti memainkan peran yang strategis dalam pengambilan keputusan politik, paling tidak dalam skala lokalitas Rokan Hulu. *Ketiga*, relasi antara kaum tarekat dengan kelompok lain (institusi politik dan aktor politik) menunjukkan warna politik tarekat Naqshabandiyah dalam ranah politik lokal Rokan Hulu. *Keempat*, relasi politik dan peranan politik yang dimainkan oleh kelompok tarekat menunjukkan interaksionisme tarekat dalam ranah politik lokal sehingga aspek itu menjadi variabel untuk memperjelas pragmatisme tarekat dalam politik di Rokan Hulu. Berdasarkan uraian pemikiran itu, studi ini memfokuskan kajian pada pertanyaan pokok yaitu, ***Mengapa aktor dan institusi melakukan pragmatisme Thariqat dalam kontestasi politik lokal Rokan Hulu?***

Pragmatisme Tarekat Naqshabandiyah dalam politik ini ditinjau berdasarkan karakteristik lokalitas Rokan Hulu. Karakteristik itu membedakan tipe masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan dalam menyikapi berkembangnya pragmatisme Islam. Oleh sebab itu,

sebagai derivasi dari fokus utama di atas, dirumuskan sub-sub bab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontestasi dan pembentukan budaya politik Thariqat Naqsabandiyah dalam dinamika sosial-politik Rokan Hulu?
2. Bagaimana proses pragmatisme melalui perubahan pola tindakan kaum tarekat naqsabandiyah di Rokan Hulu berlangsung?
3. Bagaimana dampak pragmatisme kaum tarekat dalam pembentukan identitas lembaga politik lokal di Rokan Hulu?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Studi terhadap masalah-masalah tersebut di atas dilakukan di Rokan Hulu - Riau. Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan, daerah ini merupakan tempat perantauan suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sementara itu, di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara. Sejak abad yang lampau, suku-suku ini telah mengalami Melayunisasi dan umumnya mereka mengaku sebagai suku Melayu. Oleh sebab itu, perkembangan ajaran Tarekat yang disebarkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan mudah diterima dan penyebarannya cepat dan merata di seluruh wilayah Rokan Hulu. Namun demikian, sebagai catatan perjalanan sejarah, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Tambusai lebih dikenal

sebagai awal dari pusat-pusat gerakan Tarekat Naqsabandiyah di Rokan Hulu. Dari pusat-pusat gerakan itulah kemudian ajaran Tarekat menyebar luas dan menjadi ciri khas masyarakat Rokan Hulu sehingga jamaah Tarekat ‘menjelma’ menjadi basis sosial-politik yang kuat.

Berangkat dari hal itu, studi ini akan fokus menganalisis pragmatisme kaum Tarekat Naqsabandiyah dalam politik yang mencakup pembahasan-pembahasan tentang eksistensi gerakan, kepemimpinan dan peran politik, relasi dan pola dukungan politik dengan kekuatan sosial-politik lain serta preferensi politik kelompok Tarekat. Berdasarkan pembahasan dan analisis tersebut, studi ini lebih lanjut dapat menjelaskan gejala pragmatisme kaum tarekat dalam penentuan dukungan politik pada ranah politik lokal Rokan Hulu dan dampak pragmatisme itu bagi tarekat, institusi dan aktor politik di Rokan Hulu.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Seluruh pembahasan studi ini dengan cakupan dan lingkup pembahasan terurai di atas dapat menghasilkan temuan-temuan mengenai pragmatisme organisasi Islam lokal dalam politik khususnya kajian tentang pragmatisme komunitas Tarekat Naqsabandiyah pada ranah politik lokal Rokan Hulu. Kategori temuan ini dimaksudkan sebagai kontribusi keilmuan tentang hubungan agama (Tarekat) dan politik. Karena itu, penelitian ini memiliki arti penting dalam upaya memperkaya teori politik dalam studi politik Islam. Teori tersebut secara khusus bertujuan; *pertama*, menjelaskan kontestasi dan pembentukan budaya politik kaum tarekat dalam dinamika politik eletoral (lokal dan nasional) di Rokan Hulu. *Kedua*, menjelaskan proses pragmatisme komunitas Tarekat Naqsabandiyah dalam ranah politik lokal Rokan Hulu, dan *ketiga*, dampak pragmatisme tarekat dalam pembentukan identitas lembaga di masyarakat Rokan Hulu.

Adapun hasil dan manfaat penelitian ini dapat menjelaskan posisi komunitas Tarekat Naqshabandiyah dalam situasi politik yang semakin berkembang dan terbuka. Hasil penelitian ini lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan (*knowledge contribution*) terhadap studi politik Islam, antara lain; **Pertama**, penjelasan tentang pola pembentukan preferensi politik yang dapat digunakan sebagai alat analisis ilmuwan politik untuk menelaah proses-proses sosial-politik masyarakat muslim umumnya dan khususnya jamaah Tarekat. **Kedua**, kerangka teori untuk menjelaskan peran dan fungsi sosial-politik Tarekat dalam ranah politik lokal.

Sementara itu, secara praktis penelitian ini dapat dijadikan alternatif dan pertimbangan politik bagi para elit politik lokal maupun partai politik dan kelompok sosial-politik lainnya. Kegunaan praktis ini dapat pula digunakan oleh pemerintah dalam memetakan keberadaan kelompok Islam lokal dengan ciri khasnya masing-masing termasuk proses ritual yang mereka jalankan. Khazanah Islam juga akan semakin berkembang dengan melihat hasil studi ini secara mendalam sebab masing-masing pihak akan memahami posisinya dalam lingkup sosial dan politik.

1.5 Publikasi

1. Handoko, T., Mulkan, A. M., Azhar, M., Hidayati, M., Yusril, A., & Suryana, D. (2021). Political Behavior Shifting Of The Naqshabandiyah Congregation In The New Post-Order Elections: Case Study Naqshabandiyah Rokan Hulu-Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1-9.
2. Handoko, T., Hidayati, M., Azhar, M., Mulkan, A. M., Rafi, M., Setiawan, D., & Rahmanto, F. (2021). Commodification Of Religion In The Realm Of Local Politics: A Study Of The Tarekat Naqshabandiyah In Rokan Hulu Regency. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 167-182.